

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah melandasi pengembangan otonomi di Indonesia, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pemberdayaan, pelayanan, dan ikut serta peran dari masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah memberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, serta melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah ditentukan tentang sumber-sumber penerimaan dan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah.

Ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 berdampak pada daerah yaitu mendapatkan hak untuk mencari dan meningkatkan potensi sumber penerimaan yang ada di daerahnya sendiri, serta diharapkan dapat membangkitkan semangat pemerintah daerah pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka membangun daerahnya agar lebih mandiri. Dicerminkan dari kondisi finansial sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah, yang diukur berdasarkan tinggi rendahnya PAD. Menurut Undang-

Undang pasal 1 ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya masih bergabung dengan Sumatera Selatan, hingga tahun 2000 memisahkan diri menjadi sebuah provinsi sendiri. Di acara upacara hari ulang tahun Ke-17 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, Erzaldi Rosman yang merupakan gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, bahwa perkembangan mencolok terlihat dari PAD yang naik hingga ratusan miliar rupiah. Ia mengatakan pertama provinsi terbentuk PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisaran Rp 48 Miliar, kemudian selalu meningkat setiap tahunnya. PAD pada tahun 2017 telah lebih dari Rp 700 miliar sejak melepaskan diri dari Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan perkembangan yang signifikan (kompas.com, 2017).

PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2014 hingga 2018 berfluktuatif setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018

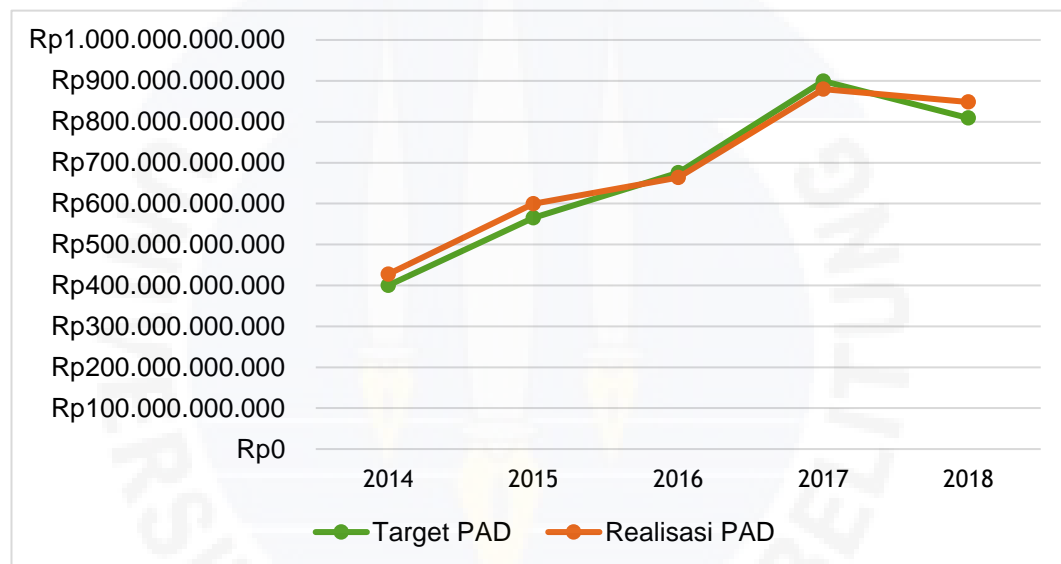
TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2014	399.965.098.144	427.580.506.879	106,90
2015	565.350.614.641	599.620.953.180	106,06
2016	675.163.916.493	663.445.639.676	98,26
2017	899.566.349.616	879.784.561.698	97,80
2018	809.395.435.702	848.330.012.018	104,81

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui selama periode tahun 2014-2018 realisasi penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata selalu

mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat, walaupun pada tahun 2016 dan 2017 PAD Provinsi tidak mencapai target. PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat tiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sedikit yaitu 3,5% dari total PAD sebelumnya, agar lebih jelas dan mudah dipahami, realisasi PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini:

Gambar I.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Gambar I.1 dapat dilihat pergerakan antara target dan realisasi PAD yang berdekatan, yaitu rata-rata realisasi PAD pada periode tahun 2014-2018 berada di atas target kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2017, namun pada 2 tahun tersebut realisasi PAD tercapai tidak jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terlihat bergerak naik dari tahun 2014-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Sumber PAD sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu penyokong PAD adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dari definisi tersebut maka salah satu alternatif untuk meningkatkan PAD yaitu melalui pajak dan retribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten, sedangkan retribusi daerah terdiri dari retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Pajak kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penelitian ini menggunakan beberapa pajak yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan sektor pariwisata, untuk mengukur peran kontribusi dua sektor tersebut terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pajak yang dimaksud meliputi:

a) Sektor Pertambangan yaitu:

1. Pajak mineral bukan logam dan batuan
2. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

b) Sektor Pariwisata yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

Retribusi daerah yang digunakan yaitu retribusi jasa usaha yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan sektor pariwisata, namun berdasarkan hasil data laporan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang peneliti dapat, hanya retribusi jasa usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Retribusi yang dimaksud meliputi:

1. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah lain-lain
3. Retribusi keplabuhan
4. Retribusi tempat wisata
5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut:

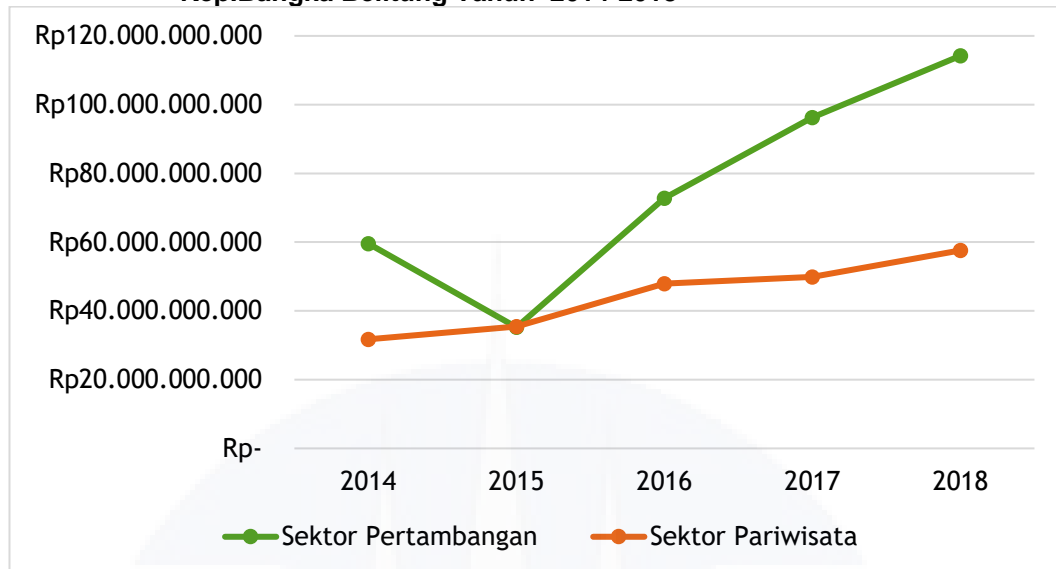
Tabel I.2 Rekapitulasi Realisasi Kontribusi Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata terhadap PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun	Sektor pertambangan (Rp)	Sektor Pariwisata (Rp)	Total PAD (Rp)	Sektor Pertambangan (%)	Sektor pariwisata (%)
2014	59.591.345.847	31.742.903.149	427.580.506.879	13,94	7,42
2015	35.230.805.563	35.576.078.187	599.620.953.180	5,93	5,92
2016	72.771.417.844	47.957.942.361	663.445.639.676	10,97	7,23
2017	96.237.290.589	49.857.480.706	879.784.561.698	10,94	5,67
2018	114.215.783.026	57.595.728.153	848.330.012.018	13,46	6,79

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel I.2 dapat diamati bahwa kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata dalam persentase terhadap PAD berfluktuatif pada periode tahun 2014-2018, dilihat juga bahwa kontribusi sektor pertambangan lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 11,03% dari total PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan sektor pariwisata yang menyokong rata-rata PAD sebesar 7%. Kontribusi pada sektor pertambangan dan pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada sektor pertambangan pada tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 8,06% dari tahun sebelumnya, agar lebih jelas dan mudah dipahami, rekapitulasi realisasi kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar I.2 berikut:

Gambar I.2 Rekapitulasi Realisasi Kontribusi Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata terhadap PAD 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep.Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Gambar I.2 dapat dilihat pergerakan kedua sektor tersebut dominan bergerak naik, yang menandakan ada peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan kontribusi PAD dua sektor tersebut akan berperan sebagai penopang bagi masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi yang berfokus terhadap peningkatan produksi barang dan jasa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sebagai indikator, salah satu indikator yang bisa melihat perkembangan perekonomian maupun dijadikan ukuran kemakmuran masyarakat secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto yang disebut juga sebagai agregat ekonomi yang dihasilkan masyarakat wilayah tersebut, dari agregat ekonomi tersebut kemudian dapat diukur pertumbuhan ekonomi dan struktur

perekonomian suatu wilayah, maupun tingkat kesejahteraan penduduk (Rizka, 2018).

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan melalui PDRB. Berikut ini adalah PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga konstan selama periode tahun 2014-2018 terakhir yang ditunjukkan pada Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3 PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2017

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	44.159.439	45.962.303	47.848.371	49.986.846	52.212.088
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,67	4,08	4,1	4,47	4,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Bangka Belitung, diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel I.3 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2014-2018 PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan setelah pada 2013-2015 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun. Perekonomian global yang semakin membaik pasca krisis yang sempat terjadi pada tahun 2013 mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap beberapa komoditas lokal seperti timah, karet, dan kelapa sawit (Rizka, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Oktaviana dan Amalia tahun 2018 hasil perkiraan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kuartal pertama tahun 2018 hingga kuartal keempat tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat, dari hasil penelitian tersebut dapat diperkirakan bahwa PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan memiliki pertumbuhan yang baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa kedua sektor tersebut sama-sama memberikan kontribusi positif dan berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap kabupaten dan kota memiliki potensi yang berbeda-beda, ada kabupaten yang condong memiliki potensi bagus untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata seperti Kabupaten Belitung dan kabupaten yang berpotensi bagus untuk tetap dikembangkan pada sektor pertambangan yang memang telah lama dijadikan sektor utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini dianggap penting dilakukan karena bertujuan untuk meneliti potensi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap dua sektor yang saat ini menjadi dilema, yaitu sektor pertambangan dan sektor pariwisata dalam rangka memberikan masukan penetapan kedua sektor tersebut secara tepat pada setiap kabupaten/kota dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dianggap penting oleh peneliti untuk dilakukan penelitian dengan berjudul **“PERBANDINGAN PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN DAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana perbandingan realisasi PAD sektor pertambangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
4. Upaya apa yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan peran sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah untuk membatasi permasalahan yang ada agar tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini dibatasi dengan hal berikut:

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji efektivitas kontribusi PAD sektor pertambangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilihat menggunakan data PDRB.
2. Objek penelitian ini adalah PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata 6 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis kontribusi sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Untuk menganalisis perbandingan realisasi PAD sektor pertambangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Untuk menganalisis apa yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan peran sektor pertambangan dan sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang kontribusi PAD dari sektor pertambangan dan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi tentang kontribusi PAD dari sektor pertambangan dan sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan membantu Kepala Dinas untuk membuat kebijakan dalam mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang cocok di 1 Kota dan 6 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat meningkatkan perekonomian daerahnya lebih maksimal.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam bab ini peneliti melakukan penelitian mengenai “Perbandingan peran PAD Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Adapun sistematika penelitian skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada, teori mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan variabel penelitian, skala pengukuran variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum kontribusi PAD sektor pertambangan dan sektor pariwisata dan membuat jawaban dan penjelasan hasil analisis data yang diperoleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membuat kesimpulan mengenai hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat serta memberikan saran-saran yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkait.